

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERORIENTASI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DI KOTA BOGOR**

**Anton Soeharsono**

Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia

[a.soeharsono71@gmail.com](mailto:a.soeharsono71@gmail.com)

**Muchlis Hamdi**

Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia

[muchlishamdi@ipdn.ac.id](mailto:muchlishamdi@ipdn.ac.id)

**Dedeh Maryani**

Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia

[dedehmaryani@pps.ipdn.ac.id](mailto:dedehmaryani@pps.ipdn.ac.id)

**Masrich**

Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia

[marsich@ipdn.ac.id](mailto:marsich@ipdn.ac.id)

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah lingkungan strategis di Kota Bogor. Model penelitian adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah in-depth interview dan focus group discussion (FGD). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis belum optimal dilihat dari a) produktivitas: capaian kelompok sasaran masih rendah; b) linearitas: proses implementasi kebijakan belum sesuai dengan spesifikasi standar; dan c) efisiensi: sumber daya belum didayagunakan secara optimal. 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dilihat dari a) substansi kebijakan: didukung adanya visi misi wali kota, namun terhambat belum adanya Peraturan Walikota sebagai peraturan teknis pelaksanaan; b) perilaku pelaksana: didukung leadership pimpinan daerah, namun terhambat kurangnya komitmen pengelola untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sampah; c) interaksi jejaring kerja: didukung adanya kolaborasi, namun terhambat belum ada SOP pengelolaan sampah regional; d) partisipasi kelompok sasaran: didukung upaya pendekatan persuasif pemerintah, namun terhambat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya; dan e) sumber daya: didukung adanya keterlibatan pihak di luar pemerintah, namun terhambat prosedur dan birokrasi pelaksanaan kebijakan belum responsif dan akseleratif. 3) Model Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis dirumuskan peneliti sebagai model pengelolaan sampah yang ideal.*

*Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Model Tata Kelola Persampahan, Orientasi Lingkungan Hidup Strategis.*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of strategic environmental waste management policies in Bogor City. The research model is qualitative with descriptive analysis techniques. The techniques used for data collection in this study were in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study show that: 1) the implementation of*

*strategic environmental-oriented waste management policies is not optimal in terms of a) productivity: the achievement of the target group is still low; b) linearity: the policy implementation process is not in accordance with standard specifications; and c) efficiency: resources have not been utilized optimally. 2) The supporting and inhibiting factors for the implementation of the policy are seen from a) the substance of the policy: it is supported by the mayor's vision and mission, but is hampered by the absence of a Mayor's Regulation as an implementing technical regulation; b) behavior of executors: supported by regional leadership leadership, but hampered by lack of management commitment to maintain continuity of waste management; c) interaction of working networks: supported by collaboration, but hampered by the absence of regional waste management SOPs; d) participation of the target group: supported by the government's persuasive approach, but hampered by the lack of public awareness to sort waste from its source; and e) resources: supported by the involvement of parties outside the government, but hampered by procedures and bureaucracy in implementing policies that have not been responsive and accelerated. 3) The Strategic Environment-Oriented Waste Management Governance Model is formulated by researchers as an ideal waste management model.*

*Keywords: Public Policy Implementation, Waste Management Model, Strategic Environmental Orientation.*

## PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi masalah pelik bagi sebagian besar wilayah perkotaan. Hampir seluruh penduduk menghasilkan sampah setiap hari, sepanjang tahun.<sup>1</sup> Demikian pula dengan bertambahnya populasi penduduk jumlah produksi sampah juga turut bertambah. Pertumbuhan populasi umumnya dibarengi dengan peningkatan konsumsi.<sup>2</sup> Meningkatnya konsumsi berimbas langsung dengan bertambahnya jumlah sampah yang diproduksi. Dengan demikian, pertambahan penduduk di suatu Kawasan membawa implikasi bertambahnya volume sampah yang dihasilkan.<sup>3,4</sup>

Wilayah Kota Bogor merupakan wilayah yang secara topografi cukup datar dan sedikit bergelombang pada bagian selatan. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan perkotaan berupa permukiman dan prasarananya serta kegiatan ekonomis lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa. Di samping itu wilayah Kota Bogor yang termasuk dalam konstelasi Kawasan Jabodetabek terhubung dengan kota inti yaitu DKI Jakarta melalui jejaring transportasi yang baik sehingga menyebabkan pergerakan penduduk antara kedua kota tersebut menjadi sangat mudah. Kondisi tersebut didukung dengan kebijakan perwilayahan yang memberikan peran pengembangan kegiatan perumahan dan sarana pendukungnya serta industri di Kota Bogor sebagai kota satelit dalam konstelasi Jabodetabek.

---

<sup>1</sup> Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Brooks/Cole, 1986.

<sup>2</sup> Satmaidi, Endra. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan." *Indonesian Journal of Dialectics (IJAD)* 5.3 (2015): 127-132.

<sup>3</sup> Maolani, Dedeng Yusuf, and Deding Ishak. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste." *Kelola: Jurnal Sosial Politik* 1.2 (2018): 117-130.

<sup>4</sup> Sudipa, Nyoman, et al. "Model Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Bali." *Jurnal Ecotrophic* 14.1 (2020): 1-13.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mencatatkan timbulan sampah kota Bogor mencapai 600 ton per hari, atau sekitar 18.000 ton per bulan. Sebanyak 74% dari timbulan sampah (sekitar 450-475 ton/hari) dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, dan 26% dari timbulan sampah harian tersebut (sekitar 150 ton/hari) tidak dapat terangkut dan tersisa di dalam kota Bogor. Di lain pihak, terdapat kendala dengan mental masyarakat terkait budaya membuang sampah sembarangan, semisal di bantaran sungai. Di satu sisi masyarakat ingin agar rumahnya bersih, namun tidak peduli tempat lain menjadi kotor, walaupun sebenarnya warga sudah paham dampak buruk dari pembuangan sampah ke badan dan bantaran sungai.

Di sisi lain, pengelolaan sampah di Kota Bogor berada di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2019 mengenai tugas pokok, tata kerja, fungsi, serta uraian mengenai tugas jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup. Sejak tahun 1992 Kota Bogor telah menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. TPA ini memiliki area seluas 13,6 ha. Penanganan sampah yang dilakukan di TPA Galuga dilakukan dengan sistem *controlled landfill*, yaitu pembuangan yang dilakukan di tempat terbuka dengan pemadatan dengan menggunakan alat berat yang dilengkapi dengan pipa-pipa sebagai pengumpul dan penyalur air lindi dan gas.

Kemudian, manusia yang memiliki kecenderungan kuat untuk selalu hidup berkelompok.<sup>5</sup> Karena kesadaran inilah, maka manusia hidup dalam suatu komunitas sosial yang terdiri dari sejumlah manusia yang hidup dan saling bekerja sama satu sama lain. Komunitas sosial inilah yang kemudian menjelma menjadi apa yang disebut negara (*state*) setelah para anggota komunitas sosial sepakat mengadakan kontrak sosial untuk hidup bersama.<sup>6,7</sup>

Oleh karena itu, pemerintahan berperan dalam mengatur tata kehidupan suatu masyarakat dalam negara. Karena besarnya peran yang dijalankan tersebut tentunya suatu pemerintahan harus pula dilengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan berupa regulasi dan sebagainya serta alat untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaan tersebut berupa aparat birokrasi yang kuat.<sup>8</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan Cahyadi disebutkan bahwa salah satu peran yang melekat pada pemerintah adalah mengatur dan mengurus negara termasuk seperti perlindungan masyarakat dan wilayah negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lingkungan

---

<sup>5</sup> Birkhölzer, Karl. "The Role of Social Enterprise in Local Economic Development." *EMES CONFE* (2009).

<sup>6</sup> Tchobanoglous, George, H. Theisen, and S. Vigil. "Integrated Solid Waste Management, 'Engineering Principles and Management Issues' McGraw-Hill." *Inc., New York* (1993): 949.

<sup>7</sup> Kurniawan, Danang Aji, and Ahmad Zaenal Santoso. "Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 31-36.

<sup>8</sup> Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6.4 (1975): 445-488.

hidup serta ketertiban dan keamanan umum.<sup>9</sup> Sebab, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu ketertiban masyarakat, agar tercipta kehidupan masyarakat yang wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

## LITERATURE REVIEW

### A. Implementasi Kebijakan Publik Oleh Pemerintah

Pada penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Serang Provinsi Banten, 1) implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan: a) dari dimensi produktivitas yaitu sosialisasi target program yang rendah dan masalah ketersediaan dan keakuratan data program yang dibutuhkan.; b) dari dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP yang berpihak pada kebutuhan masyarakat tidak tersedia lengkap; c) dari dimensi efisiensi yaitu ketersediaan sumber daya di bawah standar; 2) determinan yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang Tahun 2014- 2016: a) dari sisi substansi kebijakan: tidak ada kejelasan tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang dan belum dilengkapi dengan Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan dasar, b) dari sisi perilaku tugas pelaksana kebijakan: komitmen, tingkat kinerja, kompetensi, dan ketaatan petugas pelaksana terhadap SOP masih kurang memuaskan, c) dari sisi interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana: komunikasi dan interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana belum memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang media sosial; d) dari sisi partisipasi kelompok sasaran: partisipasi masyarakat sasaran belum memuaskan (jumlah angka putus sekolah masih cukup tinggi); e) dari sisi ketersediaan pelaksana, peralatan, informasi dan teknologi belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Teori Hamdi relevan dijadikan acuan implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang, namun perlu ada penambahan indikator baik untuk dimensi maupun determinannya.<sup>11</sup> Adapun kontribusi keilmuan dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan model teoretis baru implementasi kebijakan yang selalu menampilkan dimensi dan determinan secara bersamaan.

---

<sup>9</sup> Cahyadi, Andi, Sriati Sriati, and Andy Al Fatih. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga." *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)* 2.2 (2018): 20-24.

<sup>10</sup> Costa-Rosa, Abílio da. "A Instituição de Saúde Mental Como Dispositivo Social de Produção de Subjetividade." *Estudos de Psicologia (Campinas)* 29 (2012): 115-126.

<sup>11</sup> Hamdi, Hamdi. "Konsep Perencanaan dan Pengembangan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Jalan Sabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat." *Planesa* 2.2: 212945.

Dalam istilah kebijakan atau *policy* dapat dimaknai dengan berbagai ragam oleh para ahli maupun lembaga Internasional. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu suatu rencana.<sup>12</sup> Dapat pula dimaknai sebagai suatu prinsip tindakan pemerintah menuju tujuan tertentu.<sup>13</sup> Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.<sup>14</sup>

Implementasi kebijakan juga merupakan salah satu aspek penting dari seluruh rangkaian proses kebijakan, Udoji mengemukakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented*".<sup>15</sup> Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan suatu kebijakan. Berbagai kebijakan hanya akan merupakan suatu impian yang berupa rencana bagus belaka yang tersimpan dalam arsip, jika tidak diimplementasikan atau hanya sebagai koleksi semata.

Juga dijelaskan bahwa definisi Implementasi Kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil.<sup>16</sup> Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, secara rinci dan berjenjang menjadi program-program (dan juga mungkin lebih rinci lagi, menjadi sub-sub program) dan kegiatan-kegiatan. Pengkajian terhadap implementasi kebijakan selalu menampilkan dua dimensi utama yaitu indikator dan determinan.<sup>17</sup>

Dengan menggunakan menggunakan analisis model implementasi kebijakan Muchlis Hamdi, karena penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana faktor dimensi dan determinan pada pengelolaan sampah di Kota Bogor. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor merupakan program pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat Kota Bogor.

---

<sup>12</sup> Wachid, Abdul, and David Laksamana Caesar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus." *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6.2 (2021): 173-183.

<sup>13</sup> Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gave Media, 2012.

<sup>14</sup> Mokodompis, Yulianto, Markus Kaunang, and Ventje Kasenda. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019).

<sup>15</sup> Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis." *Policy Studies Journal* 8.4 (1980): 538-560.

<sup>16</sup> Therivel, Riki, et al. *Strategic Environmental Assessment*. Routledge, 2013.

<sup>17</sup> Rubin, Herbert J., and Irene S. Rubin. *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. Sage, 2011.

## B. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijaksanaan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>18</sup>

Terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya sebagai Sumber Daya keuangan, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan; Sumber Daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan.<sup>19</sup> *Probably the most essential resources in implementing policy is staff*; Sumber daya kewenangan dimana kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, model implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Sebab, keberhasilan sebuah kebijaksanaan untuk diimplementasikan sangat tergantung pada tingkat kemampuan terimplementasinya (*implementability*) kebijaksanaan itu sendiri. *Implementability* tersebut dapat dilihat dari Isi Kebijaksanaan (*Content of Policy*) dan Konteks Kebijaksanaan (*Context of Policy*).

## C. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di uraikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Perlu diketahui, sumber utama dari sampah membusuk adalah sisa-sisa makanan, baik sisa dari pengolahan makanan maupun sisa konsumsi, Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan di setiap daerah karena perbedaan pola konsumsi sebagai hasil dari standar dan gaya hidup penduduknya yang berbeda pula.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Yulistia, Gusrini, Margaretha Suryaningsih, and Dewi Rostyaningsih. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah." *Journal of Public Policy and Management Review* 4.3 (2015): 174-185.

<sup>19</sup> Yudianto, Tri, Prabang Setyono, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20.1 (2021): 21-26.

<sup>20</sup> Agustino, Leo. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPi Bandung, 2006.

<sup>21</sup> Singhirunnusorn, Wichitra, Kidanun Donlakorn, and Warapon Kaewhanin. "Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviours: A Case of Waste Bank Project in Mahasarakham Municipality." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 36 (2012): 688-697.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah; sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (responsif) terhadap sikap masyarakat umum.<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan sampah terpadu (*integrated Solid Waste Management*) adalah suatu kerangka petunjuk untuk merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan sampah baru dan/atau menganalisis serta mengoptimalkan sistem saat ini.<sup>23</sup>

Kemudian, pengelolaan sampah 3R sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan sampah modern yang mana tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (*reduce, reuse, recycle*) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan.<sup>24</sup>

#### **D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Maka tujuan utama KLHS adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor yang berorientasi pada lingkungan hidup strategis, digunakan perspektif dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi.<sup>25</sup>

Sedangkan, konsep untuk mengamati keberhasilan implementasi terdapat tiga dimensi penting, yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi. Dengan kata lain baik buruknya ketiga dimensi tersebut dipengaruhi oleh kelima faktor yang telah disebutkan di atas (perhatikan arah panah dari lima faktor), dimana perspektif keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari aspek : 1) Pengorganisasian, penyesuaian dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta

---

<sup>22</sup> Yang, Ming-Ying, Manlai You, and Fei-Chuan Chen. "Competencies and Qualifications for Industrial Design Jobs: Implications for Design Practice, Education, and Student Career Guidance." *Design Studies* 26.2 (2005): 155-189.

<sup>23</sup> Witjaksono, Mit. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 1.1 (2009).

<sup>24</sup> Douglass, Mike. "The Political Economy of Urban Poverty and Environmental Management in Asia: Access, Empowerment and Community Based Alternatives." *Environment and Urbanization* 4.2 (1992): 9-32.

<sup>25</sup> Kholil, Eriyatno, and Surjono Hadi Sutjahyo. "Pengembangan Model Kelembagaan Pengelola Sampah Kota dengan Metode ISM (Interpretative Structural Modeling) Studi Kasus di Jakarta Selatan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2.1 (2008).

metode untuk menjadikan program berjalan; 2) Penafsiran (interpretasi) program menjadi rencana, pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini diperlukan informasi proses kebijakan, standarisasi yang jelas, serta tingkat dukungan; dan 3) Penerapan (aplikasi) pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.<sup>26</sup>

Pentingnya kajian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik untuk mengukur dan mengidentifikasi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan beserta faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya, dapat menjadi suatu masukan berupa abstrak maupun konsep untuk merumuskan dimensi-dimensi dalam membangun konstruksi model pengelolaan sampah yang sesuai dengan tujuan, sasaran kebijakan, serta orientasi lingkungan hidup strategis. Untuk itu, perlu dianalisis bagaimana kondisi internal dan eksternal para pelaksana dengan menggunakan analisis SWOT.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini akan menjelaskan (deskriptif eksplanatori) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui *in-depth interviews* dan *focus group discussion*. Selain itu data sekunder melalui berbagai rujukan buku, dokumen, serta informasi menggunakan studi kepustakaan, digunakan untuk mendukung data primer tersebut.<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini diawali dengan langkah mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke umum dan mengolah makna data.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi

---

<sup>26</sup> Sadler, Barry. *Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions*. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands, 1996.

<sup>27</sup> Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).

<sup>28</sup> Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." (2013).

atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Untuk menelaah bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan digunakan 3 (tiga) dimensi yaitu, 1) Dimensi Produktivitas, yang diukur melalui indikator jumlah pencapaian kelompok sasaran; 2) Dimensi Linearitas, dengan indikator derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana); serta 3) Dimensi Efisiensi, yang diukur dengan tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, aset, dana, dan teknologi).

Adapun pada pelaksanaannya, kebijakan yang diimplementasikan berhadapan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dianalisis dengan dimensi determinan implementasi kebijakan terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Substansi kebijakan dengan indikator konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan, dan keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain; 2) Perilaku tugas pelaksana, dengan indikator motivasi kerja, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran; 3) Interaksi jejaring kerja, yang diukur melalui indikator kerja sama antar pelaksana, dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan; 4) Partisipasi kelompok sasaran, indikatornya tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan, dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada; 5) Sumber daya, dengan indikator kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan pelaksana, ketersediaan informasi, dan ketepatan teknologi.<sup>29</sup>

Selanjutnya kerangka konseptual penelitian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Kerangka Konseptual Pemikiran

No	Konsep	Dimensi	Indikator
1	Implementasi Kebijakan (Hamdi, 2014)	1. Produktifitas	1. Upaya Pencapaian keompok sasaran 2. Jumlah pencapaian kelompok sasaran
		2. Linieritas	1. Sesuai prosedur 2. Sesuai waktu 3. Sesuai biaya 4. Seusai tempat/lahan 5. Kesesuaaian pelaksana
		3. Efisiensi	1. Pendayagunaan SDM 2. Pendayagunaan asset 3. Pendayagunaan dana

<sup>29</sup> Hamdi, Hamdi. "Konsep Perencanaan dan Pengembangan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Jalan Sabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat." *Planesa* 2.2: 212945.

			4. Pendayagunaan teknologi
2	Determinan Implementasi Kebijakan (Hamdi, 2014)	1. Substansi Kebijakan	1. Keselarasan dengan RPJMD/Renstra 2. Keselarasan dengan kebijakan lain
		2. Perilaku pelaksana	1. Motivasi kerja 2. Kemampuan pembelajaran pengelola
		3. Interaksi jejaring kerja	1. Kerjasama antar pelaksana 2. Hubungan kewenangan pemerintah daerah dan provinsi
		4. Partisipasi kelompok sasaran	1. Tingkat penerimaan manfaat kegiatan 2. Kemampuan kontribusi kelompok kegiatan 3. Peranan teknologi
		5. Sumber Daya	Ketersediaan dana, SDM, peralatan, informasi, dan teknologi

Data penelitian terdiri atas sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data sekunder adalah berbagai buku dan dokumen serta sumber informasi lainnya. Sumber data primer adalah sejumlah informan penelitian. Sumber data primer diperoleh dari jenis primer (data yang didapat langsung dari sumbernya) yang dibutuhkan untuk mengungkap dan membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis di Kota Bogor. Dalam penelitian ini data primer diambil dengan Teknik wawancara dari para informan dan *Focus Group Discussion* yang dipilih berdasar teknik *purposive sampling*.

Informan dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan para personal yang dijadikan informan atau narasumber dimaksud merupakan orang yang terlibat, bersentuhan, memiliki wawasan dan pengetahuan, serta memiliki posisi strategis atau berkepentingan terkait topic penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor

Sejak tahun 1992 Kota Bogor telah menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. TPA ini memiliki area seluas 13,6 ha. Penanganan sampah yang dilakukan di TPA Galuga dilakukan dengan sistem *controlled landfill*,

yaitu pembuangan yang dilakukan di tempat terbuka dengan pemadatan dengan menggunakan alat berat yang dilengkapi dengan pipa-pipa sebagai pengumpul dan penyalur air lindi dan gas.

Pengelolaan sampah di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah dimana regulasi tersebut berisi kebijakan serta strategi dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang diturunkan menjadi sebuah arahan dan program pengurangan dan penanganan sampah.

Perda tersebut menjabarkan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penanganan, dan penyediaan TPS atau TPST atau TPSA. Secara garis besar pengelolaan sampah diturunkan menjadi program pengelolaan sampah dengan konsep 3R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), serta *recycle* (mendaur ulang), serta bank sampah. Data yang diperoleh dari laman situs pemerintah kota bogor menyatakan bahwa terdapat 27 TPS3R dan 346 bank sampah.

**Tabel 2.** Kemampuan Lahan kota Bogor

Wilayah Pelayanan	Kemampuan Lahan					Total
	Tidak Mampu	Kurang Mampu	Sedang	Cukup Mampu	Mampu	
A	310,171	53,571	705,624	501,635	86,699	1657,7
B	301,477	90,547	664,497	318,567	67,312	1442,4
C	280,101	178,419	1418,248	740,658	107,156	2724,58
D	123,493	252,157	1036,901	390,631	12,578	1815,75
E	363,585	223,134	1557,453	1200,540	157,038	3501,75
<b>Total</b>						11142,2

Sumber: RPJMD Kota Bogor 2019-2014

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa kemampuan lahan Kota Bogor cukup mampu dalam menampung pertambahan jumlah penduduk dengan memperhitungkan kualitas lingkungan dan prasarannya sehingga penduduk yang tinggal di Kota Bogor memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas di Kota Bogor. Dari hasil analisis kemampuan lahan, wilayah Kota Bogor cenderung memiliki kemampuan lahan di kelas sedang jika akan dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Maka dari itu, Kota Bogor dapat diarahkan menjadi kawasan yang memiliki fungsi untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, termasuk di dalamnya infrastruktur pengelolaan persampahan, dimana dikembangkan Kawasan sebagai Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dan Stasiun Pengolahan Antara (SPA) di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Namun demikian, berdasarkan

Peraturan Daerah No.6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No.8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tidak lagi ditetapkan adanya kawasan sebagai TPPAS dan SPA, namun ditetapkan diperbanyak TPS di setiap kelurahan.

**Tabel 3.** Risiko Persampahan kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat	302,85	433,23	281,45	1.314,03	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	150,49	1.485,77	816,45	597,35	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	306,34		353,99	176,34	836,67
4	Kec. Bogor Timur	312,58	462,65		272,77	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	345,38		324,71	1.142,05	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	222,73	759,12	474,38	603,77	2.060,01
Total		1.649,36	3.140,78	2.250,98	4.106,31	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Kemudian, KLHS dipertimbangkan dari jasa ekosistem, dimana jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil identifikasi isu dari berdasarkan hasil telaahan 6 muatan KLHS yang menghasilkan 7 isu strategis, dimana yang relevan dengan topik penelitian yang diambil yaitu: Timbulan sampah Kota Bogor yang dominan pada kawasan permukiman; dan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Bogor. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor dan Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

## **B. Produktivitas Kebijakan**

Dimensi pertama untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis yaitu dimensi produktivitas, dimana dalam perspektif dimensi ini dilihat dari upaya yang dilakukan dan seberapa banyak pencapaian kelompok sasaran.

Terkait upaya yang dilakukan untuk mencapai target informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengatakan bahwa TPS3R merupakan hal yang kejar untuk Pengelolaan sampah kawasan lingkungan, dan kalau bisa menurutnya dari kawasan lingkungannya sendiri itu sudah direduksi/dikurangi, kemudian pemilahan sampah disumber bukan di TPS tapi di sumber dari kawasan-kawasan tadi yang masuk ke dalam TPS3R nanti kita kerja sama dengan bank sampah.

Sejalan dengan keterangan informan di atas, informan Bapak Febby Dharmawan selaku Kabid Persampahan DLH Kota Bogor juga mengungkapkan bahwa: “Untuk pengelolaan TPS3R saat ini kita punya 30 tapi yang berjalan itu ada 28 saat ini mulai dari 2010 sampai dengan tahun sekarang berkembang TPS3R dan untuk disana ada pemilahan sampah organik dan anorganik untuk menjadi kompos untuk menjadi bioregister lalu berkembang lagi seiring dengan berkembangnya teknologi ke budidaya maggot dan bank sampah unit saat ini, memang tidak semua TPS3R itu ada budidaya maggot dan bank sampahnya hanya beberapa bagian saja beberapa TPS yang mempunyai budidaya maggot sama bank sampah.”

Sementara itu, keterangan terkait capaian kelompok sasaran, juga dikemukakan informan Ibu Lusi sebagai berikut:

“Bentuk TPS 3 R yang ada jumlahnya sebenarnya ada 30 ya tapi yang jalan ada 28 iya kemudian ada juga bank sampah hanya bedanya kalo di bank sampah kan pengolahan sampahnya lebih hanya untuk ke anorganik kalo di TPS 3 R itu kumpulan sampah organik dan an-organik dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengelola.”

Dari berbagai keterangan keseluruhan informan yang diwawancara yang kemudian pada proses pengkodean didapatkan bahwa berdasar *emerging code* yang relevan mengarah pada *selective coding* atau *coding-coding* tema terpilih yaitu upaya pencapaian sasaran dan jumlah sasaran (*Lampiran Coding Wawancara*), didapatkan bahwa rata-rata informan mengemukakan pandangannya mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kelompok sasaran dai kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik, akan tetapi masih belum mendongkrak tingkat capaian kelompok sasaran.

### C. Linearitas Kebijakan

Terkait upaya yang dilakukan untuk mencapai target informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengatakan:

“Kalau kita lihat kebijakan pengelolaan sampah ke depan memang kebijakan di Kota Bogor untuk pengelolaan sampah itu sebetulnya akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa ada upaya melakukan pengurangan sampah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pengurangan sampah itu adalah kalau kita berdasarkan trend jumlah

penduduk teorinya sampah itu akan selalu meningkat setiap tahun akan naik terus naik kalau kita lihat melalui grafik dan tindakannya bisa saya kasih, dia akan naik terus ke atas, yang di atas naik ke atas. Kalau tidak ada upaya pengurangan, apapun yang kita lakukan maka hanya akan menambah luas TPA, TPA terus, nah ini maka akan jadi kebijakan strategis, karena apa, kalau kita hanya memperluas TPA terus maka sampai kapanpun ngga akan cukup pak, maka harus ada teknologi harus ada upaya untuk mengurangi sampah. Kebijakan kami di Kota Bogor adalah di dalam Jaksrada melakukan upaya pengurangan sampah sesuai dengan turunan Jaksra nasional nah ini kita lihat yang paling bawah yang kuning adalah upaya pengurangan sampah yang selalu kita coba tingkatkan, kalo upaya pengurangan sampahnya naik yang bawah ini maka upaya yang harus kita tangani sepanjang tahun harusnya turun, nah yang di tengah ini pak turun.”

Informan Bapak Rama dari PSTRP Jabar yang mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Awal itu tahun 2008 pak, jadi 2008 itu sudah ada permintaan dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor atas kendalanya persampahan di wilayahnya yang terutama itu di Depok si pak sebetulnya, yang kedata sebagai limbah itu sampai saat ini memang sudah over limit lah gitu untuk penampungannya di TPA, awalnya dari situ kita melakukan DMB tahun 2010 an iya, awal pembangunan infrastruktur itu tahun 2012 sudah *starting* dan *list* akhirnya kita melakukan galang KPBU sistem KPBU itu tahun 2017 cuman diresmikan itu tahun 2019 akhir.”

Dari keterangan informan, dapat memberikan gambaran bahwa di tingkat pelaksana di Kota Bogor bahwa waktu kebijakan terkait pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis ini telah dijalankan cukup lama dengan tindak lanjut yang bertahap.

Keterangan beberapa informan terkait dukungan anggaran tersebut memberikan gambaran bahwa dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Bogor pada dasarnya ada, namun bagi pengelola sampah di tingkatan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah lingkup daerah merasakan kekurangan dukungan anggaran.

Selanjutnya, dalam perspektif linearitas, indikasi bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis juga dapat dilihat dari ketersediaan lahan, dimana terkait tempat atau lahan in disampaikan oleh informan Bapak Febby yang mengatakan:

“Sekarang yang dibutuhkan itu kalo lahan 3x3 aja orang dipinggir rumah bapak apakah bersedia nah kadang kan gitu padahal mereka juga menghasilkan sampah itu dilematikanya persampahannya pak. nah kalo penegakan hukum ada pengawas dari lingkungan hidup tokoh PNS juga ada gitu cuman ga sebanding pak karena pns nya cuma 6 orang untuk mencakupi 1 Kota

Bogor gitu kan, kami juga terkendala sama 1 pak SDM, kami ini lebih banyak PKWT pak PNS kami dibawah kami itu untuk jumlah PNS-nya itu untuk di kami 263 tenaga *outsourcing*-nya PKWT-nya itu ada 1300 dan masih ada yang PKK dan itu bentar lagi banyak yang memasuki usia-usia pensiun kaya supir mandor udah ga ada regenerasi pak.”

Hal tersebut juga senada disampaikan oleh informan Ibu Lus yang mengemukakan keterangan berikut : “Kita punya 68 kelurahan minimal kita punya 68 TPS3R sedangkan sekarang baru 30 pak nah kendalanya itu pertama lahan pak, karena untuk TPS3R itu kan minimal butuh lahan 200 meter, sedangkan kalo di kota 200 meter orang lebih baik untuk bangun kontrakan.”

Dari beberapa keterangan informan tersebut di atas perihal ketersediaan lahan atau tempat pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis, memberikan gambaran bahwa di Kota Bogor masih terdapat kesulitan untuk mendapatkan lahan-lahan untuk dijadikan sebagai sarana pengolahan sampah. Idealnya pengelolaan sampah menjalankan strategi yang mana penanganan sampah kota harus diarahkan pada pengurangan sampah di sumber.<sup>30</sup> Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lahan yang semakin sulit diperoleh.

#### **D. Efisiensi Kebijakan**

Dimensi selanjutnya yang dijadikan sebagai perspektif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis yaitu efisiensi kebijakan, dimana dimensi ini digambarkan melalui indikasi tingkat pendayagunaan terhadap sumber daya manusia, aset, dana dan teknologi. Terkait sumber daya manusia, informan Bapak Bambang selaku pengurus KSM TPS3R mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Untuk sementara ini yang kami dapat untuk dari kebijakan Kota Bogor itu alhamdulillah dibantu juga dalam segala macam halnya berbentuk pelatihan-pelatihan, untuk masalah pengelolaan sampah ini termasuk masalah maggot juga, masalah ternak lele juga iya gitu.” Keterangan tersebut dapat menggambarkan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Bogor berupaya melakukan pendayagunaan dalam hal SDMSDM hingga di tingkatan pelaksana kebijakan, dalam hal ini masyarakat dalam kelembagaan KSM TPS3R.

Selanjutnya, dikemukakan pula oleh informan Bapak Bambang perihal upaya pendayagunaan SDM dalam pengelolaan sampah, sebagai berikut:

“Cuma kita sudah hampir setahun dua tahun ya belum ada pelatihan lagi, tapi rencananya katanya bilamana kondisi di bulan Desember ini tidak ada pandemi akan ada pelatihan lagi untuk masalah sisi pelaporan sifatnya langsung melalui AHP atau gimana saya kurang tahu, nah dari situ untuk masalah pengelolaan sampah itu kebijakan ari pemerintah ada untuk masalah BOP tapi kita

---

<sup>30</sup> Puspitawati, Yuni, and Mardwi Rahdriawan. "Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 8.4 (2012): 349-359.

harus bisa memanfaatkan itu dari masyarakat jadi kita dapet BOP, jadi kita dapat BOP, jadi bukannya BOP secara langsung untuk ini, melalui sistimnya kita dapat 4 orang tapi kan kita ini pekerja ada 17 pak, gak mungkin hanya 4 orang ini yang dapat, nah akhirnya kita dikumpulkan dibagi rata ada yang kebagian berapa beda-beda gitulah, nah dari situ kita untuk masalah kelanjutannya dinas melakukan pertama awal dulu untuk permodalan lah gitu kalo semacam maggot ke, pelatihannya segala macam setelah kesena lepas ya kadang-kadang ada yang maju yang bisa lanjut ada yang engga gitu pak ya, Cuma kebetulan kalo saya ma lanjut masalah maggot juga, lele ada juga tetep gitu, nah masalah pengembangan inovasi itu bagaimana wilayah masing-masing, gitu masalah disini bisanya apa kan beda-beda pak, diwilayah itu beda-beda, disana beda, disini beda gitu nah kebetulan kalau disini ma saya kemarin itu sifatnya masalah bikin bata itu kita terus terang pak kalo kita hanya bisa membantu dalam hal untuk pengurangan pembuangan sampah ke Galuga itu.”

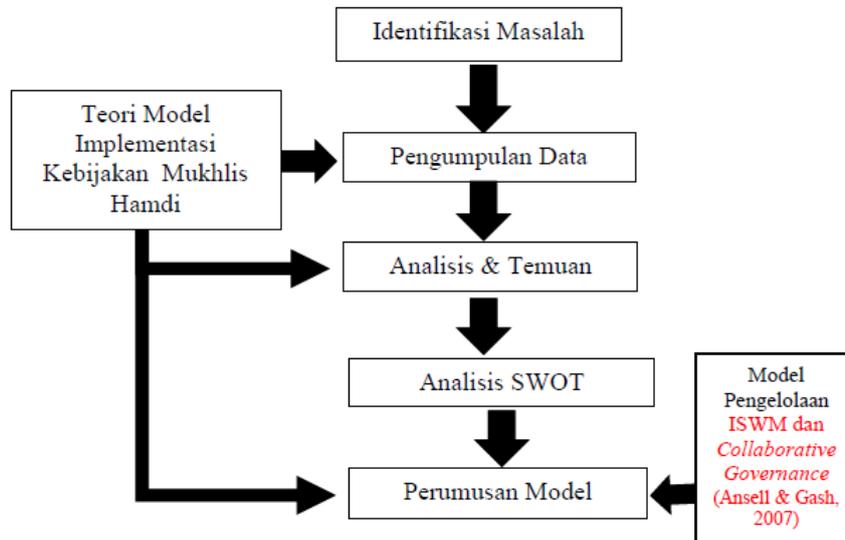
Keringanan beberapa informan di atas memberikan gambaran bahwa pendayagunaan SDM dalam pengimplementasikan kebijakan pengelolaan Sampah berorientasi lingkungan hidup strategis ini belum optimal. Hal ini dilihat dari kurangnya ketersediaan SDM terutama di tingkatan pelaksana pengolahan sampah di daerah. Selain itu, upaya untuk memberdayakan SDM dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pelatihan-pelatihan pun belum secara optimal dilakukan melalui berbagai kegiatan yang merata, rutin dan berkesinambungan.

Dari berbagai keterangan keseluruhan informan yang diwawancara yang kemudian pada proses pengkodean didapatkan bahwa berdasar *emerging code* yang relevan mengarah pada *selective coding* atau *coding-coding* tema terpilih yaitu upaya pencapaian sasaran dan jumlah sasaran (*Lampiran Coding Wawancara*), didapatkan bahwa rata-rata informan mengemukakan pandangannya mengenai efisiensi kebijakan yang dilihat dari perspektif bagaimana pendayagunaan SDM, aset, dana dan teknologi dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tan dukungan dari kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis, dimana *coding-coding* yang didapatkan dari pengolahan analisis keterangan informan perihal pendayagunaan SDM, Sebagian besar keterangan dari informan memberikan gambaran bahwa ketersediaan SDM di tingkat pemerintah Kota Bogor cukup memadai, akan tetapi di tingkatan pengelola yakni KSM TPS3R masih kekurangan SDM. Selain itu, didapatkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM belum begitu banyak dilakukan secara merata, masif dan berkelanjutan.

#### **E. Model pengelolaan Sampah**

Model pengelolaan sampah terdiri dari berbbagai tahapan pemodelan yang dijelaskan melalui gambar berikut:

Tahapan permodelan kemudian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Proses Pemodelan

Pada tahap perumusan model dilalui sebelumnya oleh analisis SWOT, dengan demikian disajikan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal yang diperoleh dari elaborasi temuan penelitian atas rumusan masalah bagaimana implementasi dan determinan implementasi kebijakan.

Berikut disajikan matrik IFAS dengan pembobotan dan pemberian skor yang diperoleh melalui kuesioner dari responden:

Tabel 4. Matrik Faktor Internal (IFAS) Pengelolaan Sampah Kota Bogor

Faktor Kunci Internasl	Bobot	Rating	Skor	Komentar
<b>Kekuatan (Strength)</b>				
1. Regulasi berupa Undang-Undang hingga Peraturan Daerah sebagai landasan kabijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis	0.18	4.00	0.73	Regulasi sebagai pedoman
2. Adanya visi misi dari Wali Kota selaku pemimpin daerah dalam hal penanganan permasalahan persampahan	0.17	4.00	0.67	Visi dan misi dalam RPJMD sebagai arahan pengelolaan
3. Adanya upaya upaya yang	0.15	4.00	0.60	Upaya melalui pemberdayaan

dilakukan pemerintah kota Bogor melalui pendekatan persuasive oleh wali kotanya dengan melalui berbagai saluran komunikasi, untuk meningkatkan partisipasi kelompok sasaran				komnitas dan sosialisasi melalui media sosial
4. Adanya program dan kegiatan pengelolaan persampahan sebagai turunan dan visi misi wali kota	0.18	4.00	0.71	Program Bank Sampah dan Bogorku Bersih harus disosialisasikan dengan masif
5. Adanya kerjasama lintas OPD dalam program-program yang mendukung program-program yang mendukung program pengelolaan persampahan	0.17	3.67	0.61	Kerja sama lebih ditingkatkan
<b>Total</b>			<b>3.32</b>	
<b>Kelemahan (<i>weakness</i>)</b>				
1. Belum adanya peraturan Wali Kota sebagai acuan teknis dan pelaksanaan engelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis yang dapat dijadikan rujukan peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis	0.12	1.67	0.19	Perlu regulasi yang jelas
2. Keterbatasan sumber dana pembiayaan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis	0.13	1.67	0.22	Perlu sumber dana yang mendukung
3. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah	0.12	2.00	0.23	Perlu adanya SDM yang mendukung

berorientasi lingkungan hidup strategis				
4. Keterbatasan teknologi dan peralatan yang memadai untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis	0.10	1.67	0.17	Harus mengikuti perkembangan zaman
5. Kurangnya komitmen para pengelola untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sampah yang sesuai dengan KLHS	0.15	1.33	0.20	Perlu sosialisasi dan edukasi yang intensif
<b>Total</b>			<b>1.02</b>	

Sebagaimana disajikan pada tabel matrik IFAS di atas, diketahui berdasarkan penilaian rata-rata responden terhadap faktor-faktor kekuatan, didapatkan bahwa skor tertinggi pada faktor kekuatan yaitu adanya regulasi berupa Undang-undang hingga Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis dengan skor 0.73, sehingga responden menilai pentingnya regulasi sebagai pedoman dari kebijakan yang diimplementasikan. Sementara, responden rata-rata menilai faktor kelemahan dengan skor tertinggi sebesar 0.23 yaitu keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis, sehingga responden menilai SDM merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan poin skor tertinggi dari kedua faktor tersebut, sebagaimana penilaian responden, maka tergambar bahwa kondisi internal Pemerintah Kota Bogor memiliki kekuatan dukungan dari kerangka regulasi sebagai pedoman pengimplementasian kebijakan, sehingga program-program terlegitimasi, sehingga responden memandang regulasi sebagai aspek sangat penting. Selain itu, tergambar pula bahwa kelemahan yang dimiliki terkait kekurangan SDM, sehingga responden memandang dibutuhkan penambahan SDM maupun pemberdayaan SDM yang ada. Dengan demikian, pada aspek kekuatan dan kelemahan, jalannya kebijakan yang terlegitimasi sesuai pijakan regulasi harus dikuatkan oleh elemen SDM yang memadai, baik kapasitas, kualitas maupun kuantitas.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian yaitu: 1) implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis belum optimal dilihat dari perspektif a) produktivitas: capaian kelompok sasaran masih rendah; b) linearitas: proses implementasi kebijakan belum sesuai dengan spesifikasi standar; dan c) efisiensi: sumber daya belum didayagunakan secara optimal. 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dilihat dari perspektif a) substansi kebijakan: didukung adanya visi misi wali kota, namun terhambat belum adanya Peraturan Walikota sebagai peraturan teknis pelaksanaan; b) perilaku pelaksana: didukung *leadership* pimpinan daerah, namun terhambat kurangnya komitmen pengelola untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sampah; c) interaksi jejaring kerja: didukung adanya kolaborasi, namun terhambat belum ada SOP pengelolaan sampah regional; d) partisipasi kelompok sasaran: didukung upaya pendekatan persuasif pemerintah, namun terhambat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya; dan e) sumber daya: didukung adanya keterlibatan pihak di luar pemerintah, namun terhambat prosedur dan birokrasi pelaksanaan kebijakan belum responsif dan akseleratif. 3) Model Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis dirumuskan peneliti sebagai model pengelolaan sampah yang ideal, terdiri dari dimensi *collaborative governance* (kolaborasi), *based goals* (standar dan tujuan kebijakan), *based actor* (aktor-aktor kebijakan), *based action* (kegiatan pelaksanaan), dan *based procedure & resources* (prosedur dan sumber daya).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).
- Birkhölzer, Karl. "The Role of Social Enterprise in Local Economic Development." *EMES CONFE* (2009).
- Cahyadi, Andi, Sriati Sriati, and Andy Al Fatih. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga." *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)* 2.2 (2018): 20-24.
- Costa-Rosa, Abílio da. "A Instituição de Saúde Mental Como Dispositivo Social de Produção de Subjetividade." *Estudos de Psicologia (Campinas)* 29 (2012): 115-126.
- Douglass, Mike. "The Political Economy of Urban Poverty and Environmental Management in Asia: Access, Empowerment and Community Based Alternatives." *Environment and Urbanization* 4.2 (1992): 9-32.
- Hamdi, Hamdi. "Konsep Perencanaan dan Pengembangan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Jalan Sabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat." *Planesa* 2.2: 212945.
- Kholil, Eriyatno, and Surjono Hadi Sutjahyo. "Pengembangan Model Kelembagaan Pengelola Sampah Kota dengan Metode ISM (Interpretative Structural Modeling) Studi Kasus di Jakarta Selatan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2.1 (2008).

- Anton Soeharsono, Muchlis Hamdi, Dedeh Maryani, Masrich: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis Di Kota Bogor
- Kurniawan, Danang Aji, and Ahmad Zaenal Santoso. "Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 31-36.
- Maolani, Dedeng Yusuf, and Deding Ishak. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste." *Kelola: Jurnal Sosial Politik* 1.2 (2018): 117-130.
- Mokodompis, Yulianto, Markus Kaunang, and Ventje Kasenda. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019).
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gave Media, 2012.
- Puspitawati, Yuni, and Mardwi Rahdriawan. "Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 8.4 (2012): 349-359.
- Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Brooks/Cole, 1986.
- Rubin, Herbert J., and Irene S. Rubin. *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. Sage, 2011.
- Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis." *Policy Studies Journal* 8.4 (1980): 538-560.
- Sadler, Barry. *Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions*. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands, 1996.
- Satmaidi, Endra. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan." *Indonesian Journal of Dialectics (IJAD)* 5.3 (2015): 127-132.
- Singhirunnusorn, Wichitra, Kidanun Donlakorn, and Warapon Kaewhanin. "Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviours: A Case of Waste Bank Project in Mahasarakham Municipality." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 36 (2012): 688-697.
- Sudipa, Nyoman, et al. "Model Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Bali." *Jurnal Ecotrophic* 14.1 (2020): 1-13.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." (2013).
- Tchobanoglous, George, H. Theisen, and S. Vigil. "Integrated Solid Waste Management, 'Engineering Principles and Management Issues' McGraw-Hill." *Inc., New York* (1993): 949.
- Therivel, Riki, et al. *Strategic Environmental Assessment*. Routledge, 2013.
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6.4 (1975): 445-488.
- Wachid, Abdul, and David Laksamana Caesar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus." *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6.2 (2021): 173-183.
- Witjaksono, Mit. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 1.1 (2009).

Anton Soeharsono, Muchlis Hamdi, Dedeh Maryani, Masrich: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis Di Kota Bogor

Yang, Ming-Ying, Manlai You, and Fei-Chuan Chen. "Competencies and Qualifications for Industrial Design Jobs: Implications for Design Practice, Education, and Student Career Guidance." *Design Studies* 26.2 (2005): 155-189.

Yudianto, Tri, Prabang Setyono, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20.1 (2021): 21-26.

Yulistia, Gusrini, Margaretha Suryaningsih, and Dewi Rostyaningsih. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah." *Journal of Public Policy and Management Review* 4.3 (2015): 174-185.